

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung, 2006.
- Alamsyah, Kamal, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, Media Citra Mandiri Press, Buah Batu, 2016.
- Alex, Nitisemito, *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Ghalia Indonesia, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Deviani, Eka dan Rifka Yudhi, *Hukum Kepegawaian: Historitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*, Pusaka Media, Bandar Lampung 2022.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Ghufron, Ahmad, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Erlangga, Surabaya, 1999.
- Hartini, Sri, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Heuken, Adolf, *Kamus Jerman-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Malayu, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Marbun, SF, dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Marbun, S.F, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2005.

- _____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Moekijat, *Analisis Jabatan, Cetakan ke-8*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Nugroho, D. Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan didalam Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1979.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sudrajat, Tedi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Suwatno, *Azas-Azas Manajemen Sumber Daya Manusia*, Suci Press, Bandung, 2003.
- Stephen P, Robbins, *Perilaku Organisasi*, Indeks, Jakarta, 2006.
- Taggala, Mustadin, *Analisis Jabatan*, Kurnia Global Publishing, Sleman, 2015.
- Tangkilisan, Hessel N.S., S. Hadi Saputro, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2003.
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, Jakarta, 2014.
- Tayibnapis, Burhannudin A, *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Thoha, Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1986.

- Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, 1957.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Wahab, Sholichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW, Malang, 2004.
- Wajdi, Farid, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Wibowo, Satrio, *Hukum Kepegawaian*, Biru Atma Jaya, Tulungagung, 2022.
- Widjaja, A.W, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Med Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Mutasi Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 566).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274).
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 339 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

C. Jurnal Ilmiah:

Adriantini Sintha Dewi, Dyah, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemeirntahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Yustisia Vol.5 No.1 Januari – April 2016

Faedlulloh, Dodi, *Kerja dalam Kesetaraan: Studi PPPK dalam Proyeksi Konfigurasi Aparatur Sipil Negara di Indonesia*, Jurnal Civil Service 9, No.2, 2015.

Fahrani, Novi Savarianti, *Manajemen Pegawai Pemenrintah dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Kota Banda Aceh*, Jurnal Civil Service, Vol. 9, No.2, November 2015.

_____, *Analisis Keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Manajemen ASN*, Jurnal Civil Service, Vol.14 No.2, November 2020.

Gusman, *Manajemen/Administrasi Kepegawaian*, artikel Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama.

Hantoro, Novianto M, *Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.2 November 2016.

Herlina, Dian, *Penerapan Prinsip-Prinsip Penempatan Pegawai di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya*, Jurnal JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), Vol.2 No.3 November 2021.

Irfan dkk, *Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan untuk Merespon Covid-19*, Jurnal The Indonesian Journal of Development Planning, Vol.IV No.2 Juni 2020.

Mezak, Meruy Hendrik, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Nugroho, Ahmad Harimurti, Nur Widiastuti, *Dampak Kebijakan Moratorium Pegawai Negeri Sipil terhadap Penempatan Pegawai di Pemerintah*

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Riset Manajemen, Vol.4 No.1 Januari 2017.

Panjaitan, Saut P, *Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*, Artikel UNISIA, 1991.

Prasojo, Eko dan Laode Rudita, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Civil Service, Vol.8 No.1 Juni 2014.

Ramadhan, Fadhel Maulana, *Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN*, artikel hukum JDIH Bappenas, 2016.

Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.

Sudrajat, Tedi, *Implikasi Hukum pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Politik di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011.

Tanumihardjo, Shinta, Abdul Hakim, Irwan Noor, *Pengaruh Analisis Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No.6, 2013.

D. Laporan Penelitian:

Atmaja, Mahendra Wija, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, Risalah Bahan Kuliah Umum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2013.

Mardhatillah, Siti Ruhama, *Laporan Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN*, dalam paparan narasumber, Komisi II DPR RI, Jakarta.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, DPR RI, 2020.

E. Media Online:

Aryanto, *The Right Man on The Right Place*, Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, <https://biro-organisasi.gorontaloprov.go.id/pesan-reformasi-birokrasi/the-right-man-on-the-right-place>, diakses pada tanggal 4 April 2024.

Asfirahani, Dieni, *Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan*, <http://pkners.blogspot.com/2010/05/prinsip-prinsip-peraturan-perundang.html>, di akses tanggal 9 Januari 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Modul Kebijakan Kehutanan* *Terkait* *Tenurial*, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html, diakses pada tanggal 15 September 2022.

Kementerian Perindustrian, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Perindustrian, <https://sippa.kemenperin.go.id/help/item/23/apa-yang-dimaksud-dengan-perpindahan-dari-jabatan-lain-#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20perpindahan,JA%2C%20JF%2C%20atau%20JPT.>, diakses pada tanggal 13 Januari 2024.

Kementerian PANRB, Humas MenPANRB, Menteri PANRB: Reformulasi PPPK Teknis Bentuk Afirmasi ke Eks THK-II dan Honorer yang Telah Mengabdikan, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-reformulasi-pppk-teknis-bentuk-afirmasi-ke-eks-thk-ii-dan-honorer-yang-telah-mengabdikan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Sari, Anggun Perwita, *Manajemen Kepegawaian*, [https://www.researchgate.net/publication/337159423 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN](https://www.researchgate.net/publication/337159423_MANAJEMEN_KEPEGAWAIAN), diakses pada tanggal 13 Januari 2024.

